

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah menjamin hak setiap anak untuk mendapat pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak dan dasar yang harus diperoleh setiap anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan bukan hanya untuk anak golongan tertentu dengan kondisi fisik dan mental yang normal tetapi apapun kondisi fisik dan mentalnya anak berhak mendapat pendidikan termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Undang-undang secara tegas telah mengatur keadilan hak setiap anak untuk mendapat pendidikan. Keadilan tersebut dengan tidak membedakan latar belakang sosial, keagamaan, budaya, fisik dan mental setiap anak. Anak berkebutuhan khusus berhak mendapat pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Akses dan layanan pendidikan harus diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu atau peserta didik agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal.

Pemerintah telah menyelenggarakan program pendidikan yang menyatukan anak dengan kondisi fisik dan mental normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas yang disebut pendidikan inklusi. Smith, J. David (2009: 45) menyebutkan istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah adalah inklusi. Pendidikan inklusi memberikan hak kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya.

Pelayanan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus tidak dibedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak lainnya, mereka mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama. Sukarno, A (2006: 142) menyatakan bahwa pelayanan inklusi merupakan pelayanan integrasi dan pelayanan *mainstreaming*. Pelayanan integrasi berarti pada sekolah regular anak berkebutuhan khusus diintegrasikan dengan anak normal, tetapi dilayani oleh guru yang professional dalam melayani anak berkebutuhan khusus, sedangkan pelayanan *mainstreaming* berarti melayani anak berkebutuhan khusus didalam sekolah umum. Dua pelayanan tersebut merupakan sistem normalisasi yang dikenal sebagai pelayanan dengan menempatkan anak pada lingkungan yang tidak terbatas. Pelayanan inklusi diartikan oleh Stain Back dan Strainback (Sukarno, A, 2006: 142) bahwa pelayanan inklusi sebagai sistem layanan anak luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama anak-anak seusianya.

Pelayanan pendidikan inklusi perlu adanya manajemen baik dari pihak sekolah maupun guru untuk menunjang pelayanan yang maksimal. Sekolah perlu menginstruksikan agar setiap anak dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat tercipta apabila ada struktur yang jelas tentang koordinasi dan pelaksanaan pembelajaran. Strukturisasi ini harus memungkinkan anak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi merupakan lembaga pendidikan formal yang seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai karakter. Sudrajat, A (2011: 3) menyatakan secara sederhana pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk memengaruhi karakter peserta didik. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Lickona (Sudrajat, A, 2011: 3) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang, sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

Penanaman nilai-nilai karakter harus dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi. Lembaga pendidikan di tingkat dasar, termasuk Sekolah Dasar penyelenggara inklusi hendaknya menjadi tempat yang baik bagi pertumbuhan karakter peserta didik.

Salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Purwokerto Timur yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan Penguatan Pendidikan

Karakter (PPK) adalah SD Negeri 5 Arcawinangun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Arcawinangun pada tanggal 9 Februari 2018 didapatkan data bahwa SD Negeri 5 Arcawinangun memperoleh Surat Keputusan (SK) nomor 421/149/2011 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagai sekolah inklusi pada tahun 2011. Anak berkebutuhan khusus yang belajar di SD Negeri 5 Arcawinangun diantaranya adalah anak dengan gangguan retardasi mental, tuna grahita, tuna rungu, tuna wicara sedang, autis sedang, dan *slow learner* yang tersebar mulai dari kelas satu hingga enam. Berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan data bahwa 57 dari 135 peserta didiknya merupakan anak berkebutuhan khusus. SD Negeri 5 Arcawinangun juga mempunyai Guru Pendamping untuk anak berkebutuhan khusus di masing-masing kelas. Kepala Sekolah juga menegaskan bahwa SD Negeri 5 Arcawinangun sudah melaksanakan program pemerintah untuk menerapkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mulai dari berjabat tangan, menyanyikan Mars PPK dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa SD Negeri 5 Arcawinangun merupakan sekolah inklusi yang berkomitmen dan berupaya menerapkan pendidikan karakter dengan sebaik mungkin. Menilik pada pentingnya penanaman pendidikan karakter, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana proses penanaman pendidikan karakter sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik. Pemilihan SD Negeri 5 Arcawinangun sebagai *setting* penelitian karena di sekolah tersebut terdapat peserta didik yang beragam, termasuk adanya peserta didik berkebutuhan

khusus. Keragaman yang ada di sekolah inklusi menjadi dasar pelaksanaan penelitian, hal ini dikarenakan pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter pada sekolah inklusi tidak semudah pada sekolah reguler.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan fokus penelitian ini yaitu implementasi atau penerapan pendidikan karakter pada kelas inklusi yang mencakup toleransi dan peduli di SD Negeri 5 Arcawinangun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kelas inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun?
2. Bagaimana hasil pendidikan karakter peserta didik pada sikap toleransi dan peduli?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kelas inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kelas inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun.
2. Untuk mengetahui hasil pendidikan karakter peserta didik pada sikap toleransi dan peduli.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kelas inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai strategi guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kelas inklusi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kelas inklusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi bagi guru untuk menambah wawasan tentang pendidikan inklusi sehingga dapat mempengaruhi pola pikir tentang anak berkebutuhan khusus serta dapat memaksimalkan pendidikan karakter pada kelas inklusi selama pembelajaran maupun diluar pembelajaran.

b. Bagi Sekolah

Sekolah dapat mengetahui kondisi lapangan mengenai implementasi pendidikan karakter di dalam kelas dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter.

c. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Peneliti juga dapat mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter pada kelas inklusi sebagai bekal pengetahuan ketika menjadi guru.

